PENGADILAN AGAMA GRESIK

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2017

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik

Gresik - Jawa Timur 61121

Telp. (031) 3991193 Fax. 031 (3981685)

e-mail : pagresik@gmail.com

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik

Telp. (031) 3991193 Fax. 031 (3981685)

Gresik - Jawa Timur 61121

e-mail : pagresik@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Gresik adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalahdengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Gresik mengacup ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Gresik. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gresik, 07 Juli 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

MOCHAMAD ISCHAQ, SH.
NIP.196708171994031009

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Pernyataan Tanggung Jawab iii
Ringkasan 10
I. Laporan Realisasi Anggaran 14
II. Neraca 16
III. Laporan Operasional 19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 22
V. Catatan atas Laporan Keuangan 24
A. Penjelasan Umum 24
A.1. Dasar Hukum 24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Gresik 25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 26
A.4. Basis Akuntansi 27
A.5. Dasar Pengukuran 27
A.6. Kebijakan Akuntansi 28
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 36
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 36
B.2. Belanja 37
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 41
C.1. Aset Lancar 41
C.2. Aset Tetap 45
C.3. Piutang Jangka Panjang 49
C.5. Kewajiban Jangka Pendek 51
C.6. Ekuitas 52

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 52
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 52
D.2. Beban Pegawai 53
D.3. Beban Persediaan 54
D.4. Beban Jasa 54
D.5. Beban Pemeliharaan 55
D.6. Beban Perjalanan Dinas 55
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 56
D.8. Beban Bantuan Sosial 57
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 57
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 58
D.11. Beban Lain-lain 59
D.12. Kegiatan Non Operasional 59
D.13. Pos Luar Biasa 60
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 60
E.1. Ekuitas Awal 60
E.2. Surplus (defisit) LO 60
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar 61
E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset 61
E.4. 2 Koreksi Nilai Persediaan 61
E.4. 3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 61
E.4. 5 Koreksi Lain-lain 62
E.5. Transaksi Antar Entitas 62
E.6. Ekuitas Akhir 63
F. Pengungkapan Penting Lainnya 63
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 63
F.2. Pengungkapan Lain-lain 63
Daftar 65
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap 65

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Gresik

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik Gresik - Jawa Timur 61121

Telp.(031) 3991193 Fax. 031 (3981685) e-mail : pagresik@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Gresik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran,Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, danCatatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Gresik telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gresik, 07 Juli 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

MOCHAMAD ISCHAQ, SH.
NIP.196708171994031009

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2017 s.d. 30 Desember 2017 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 10.142.382 atau mencapai 26.84 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.37.789.000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 2.247.028.891,- atau mencapai 47.74 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.707.039.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2017 dan 2016 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 4.564.468.936,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.48.147.754; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 4.504.280.059; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.7.041.623; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.4.564.468.936,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.43.447.600 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.43.447.600 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0,-

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 4.521.021.336,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 4.521.021.336,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp 6.684.780,- , sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 2.106.467.906,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp (2.099.783.126),- Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 18.725,- dan surplus(defisit) sebesar Rp 0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp (2.099764.401),-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp 4.383..899.228,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp (2.559.571.326),- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.236.886.509,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2017 adalah senilai Rp 4.521.021.336,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 , Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2017 , nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA GRESIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2017			TA 2016
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	37.789.000	10.142.382	26.84	20.583.724
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		37.789.000	10.142.382	26.84	20.583.724
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.813.176.000	1.796.695.091	47.12	2.208.955.530
2.	Belanja Barang	B.2.2.	758.863.000	315.416.600	41.56	293.179.700
3.	Belanja Modal	B.2.3.	135.000.000	134.917.200	99.94	97.999.660
	Jumlah Belanja Negara		4.707.039.000	2.247.028.891	47.74	2.600.134.890

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA GRESIK
NERACA
PER 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	41.500.000	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	C.1. 2.	3.020.004	3,020,004
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tagihan Ganti Rugi	C.1. 3.	(15,100)	(15,100)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penyisihan Perbendaharaan / Tagihan Ganti Rugi	C.1. 4.	3.004.904	3,004,904
Persediaan	C.1. 5.	3.642.850	5.530.350
Jumlah Aset Lancar		48.147.754	8.535.254
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	2,230,000,000	2.230.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.486.205.966	1.356.288.266
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	2,228,578,000	2.228.578.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	5,255,970	5.255.970
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1,445,759,877)	(1.445.759.877)
Jumlah Aset Tetap		4.504.280.059	4.374.362.359
Piutang Jangka Panjang	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Perbendaharan / Tagihan Ganti Rugi	C.3. 1.	(503.354)	1.006.648
Penyisihan Piutang tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Perbendaharan / Tagihan Ganti Rugi	C.3. 2.	7.544.977	(5.033)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Perbendaharan / Tagihan Ganti Rugi	C.3. 3.	7.041.623	1.001.615
Jumlah Piutang Jangka Panjang		7.041.623	1.001.615
Aset Lainnya	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4. 1.	4.999.500	0
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	8,646,500	8,646,500
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(8,646,500)	(8,646,500)
Jumlah Aset Lainnya		4.999.500	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5. 1.	1.947.600	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	41.500.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		43.447.600	0
Jumlah Kewajiban		43.447.600	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Ekuitas	C.6.1	4.521.021.336	4.383.899.228
Jumlah Ekuitas Dana		4.521.021.336	4.383.899.228
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		4.564.468.936	4.383.899.228

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA GRESIK
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember 2016
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	6.684.780	4.436.590
Jumlah Pendapatan		6.684.780	4.436.590
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1.796.695.091	2.199.856.115
Beban Persediaan	D. 3	5.459.675	11.442.800
Beban Barang dan Jasa	D. 4	198.555.600	139.936.150
Beban Pemeliharaan	D. 5	88.838.650	95.659.325
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	3.250.000	45.039.100
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	24.468.900	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	(7.550.010)	86.664.433
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2.106467.906	2.578.590.373
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.099.783.126)	(2.574.153.783)
Kegiatan Non Operasional	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	14.155.000
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		18.725	14.155.000
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0

Pos Luar Biasa	**D. 13**		
Pendapatan PNBP		**0**	**0**
Beban Perjalanan Dinas		**0**	**0**
Beban Persediaan		**0**	**0**
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		**(2.099.764.401)**	**(2.559.571.326)**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA GRESIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember 2016
Ekuitas Awal	**E. 1**	**4.383.899.228**	**4.422.642.990**
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	**E. 2**	**(2.099.764.401)**	**(2.559.571.326)**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		**0**	**0**
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	**E. 3**	**0**	**0**
Koreksi Nilai Persediaan	**E. 4**	**0**	**0**
Selisih Revaluasi Aset Tetap	**E. 5**	**0**	**0**
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	**E. 6**	**0**	**0**
Koreksi Lain-lain	**E. 7**	**0**	**0**
Jumlah Lain-lain		**0**	**0**
Transaksi Antar Entitas	**E. 8**	**2.236.886.509**	**2.592.751.903**
Ekuitas Akhir			

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Gresik

Visi Pengadilan Agama Gresik adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Mandiri, Terhormat, dan Bermartabat Artinya dimana seluruh hakim dan seluruh para pegawai harus mempunyai jiwa yang mandiri, terhormat dan bermartabat dan memiliki jiwa yang sabar dan sikap yang baik dalam melaksanakan tugas fungsi dan pokok untuk memutuskan suatu perkara.

Misi Pengadilan Agama Gresik adalah

1.Mewujudkan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan akurat;
2. Menciptakan putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat;
3. Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama Gresik yang berwawasan luas, profesional dan berakhlak mulia;
4. Memberi akses berbasis IT terhadap pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Gresik secara Transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Gresik melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1.Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia yaitu dengan mengikut sertakkan seluruh aparat Pengadilan Agama Gresik untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dala melayani masyarakat pencari keadilan.
2. Membangun Budaya Kerja Profesional yaitu dengan menghilangkan kesan Bodoh Penghasilan Sama (PGPS).
3. Pemanfaatan Tehnologi Informasi yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Gresik sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi Pengadilan, standar prosedur berpekera serta informasi lainnya menjadi mudah danmurah.
4. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan yaitu syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang enyelenggarakan perdilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalanka fungsinya (kemandirian individual / fungsional)
5. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan yaitu Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan yaitu kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak badan peradilan.
7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);

  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);

  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

    - Kewajiban Jangka Pendek

      Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam

waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	**Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo**	**0.5%**
Kurang Lancar	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan**	**10%**
Diragukan	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan**	**50%**
Macet	**1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan** **2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN**	**100%**

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  1. Tanah
  2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp. 10.142.382

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 10.142.382 atau mencapai 26.84 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 37.789.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibahyang diterima oleh Pengadilan Agama Gresik adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	541.00	811.500	150.00
2.	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	1.510.000	1.510.002	100.00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	6.040.000	7.820.880	129.48
4.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	18.000.000	0	0,00
6.	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	11.698.000	0	0,00
	Total Pendapatan	37.789.000	10.142.382	26.83

Perbandingan realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	2016	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	811.500	811.500	0	0
2.	Pendapatan Penyelesaian	1.510.002	3.020.004	(1.510.002)	(50)

	Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara				
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	482.132	(482.132)	0
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	7.820.880	10.400.040	(2.579.160)	(32.97)
5.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	14.155.000	(14.155.000)	0
6.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
7.	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0
	Total Pendapatan	28.868.676	28.868.676	(18.726.294)	(82.92)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp. 2.247.028.891

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Gresik per 30 Juni TA 2017 adalah sebesar Rp. 2.247.028.891,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 47.74% dari anggaran senilai Rp. 4.707.039.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2017		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.813.176.000	1.796.695.091	47.12
Belanja Barang	758.863.000	315.416.600	41.56
Belanja Modal	135.000.000	134.917.200	99.94
Total Belanja Bruto	4.707.039.000	2.247.028.891	47.74
Pengembalian Belanja		(90.000)	0
Total Belanja Netto	4.707.039.000	1.796.695.091	47.74

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

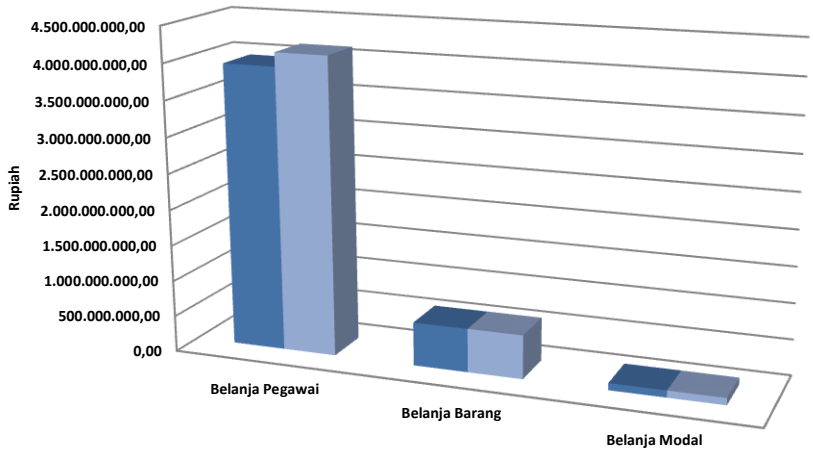

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Realisasi	3.945.233.083,00	606.117.170,00	97.999.660,00
Anggaran	4.137.197.000,00	607.502.000,00	98.000.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2017 & 2016

Penjelasan:

Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan pada tahun 2017 daripada tahun 2016 dikarenakan pada tahun 2016 banyak tambahan pegawai dan hakim yang masuk.

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	1.796.695.091	2.208.955.530	(412.260.439)	(22.94)
Belanja Barang	315.416.600	293.179.700	22.236.900	7.05
Belanja Modal	134.917.200	97.999.660	36.917.540	27.36
Total Belanja	4.649.349.913	5.240.908.055	(353.105.999)	(57.35)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai : Rp. 2.247.028.891

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Gresik per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 2.247.028.891 dan Rp. 2.600.134.890.

Penjelasan:

Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan pada tahun 2017 daripada tahun 2016 dikarenakan pada tahun 2016 banyak tambahan pegawai dan hakim yang masuk.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	737.448.400	867.573.600	(130.125.200)	(17.64)
Beban Pembulatan Gaji PNS	8.719	9.950	(1.231)	(14.11)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	54.441.600	58.737.620	(4.296.020)	(7.89)
Beban Tunj. Anak PNS	16.246.422	17.239.302	(992.880)	(6.11)
Beban Tunj. Struktural PNS	15.600.000	18.200.000	(2.600.000)	(16.66)
Beban Tunj. Fungsional PNS	747.400.000	935.395.000	(187.995.000)	(25.15)
Beban Tunj. PPh PNS	82.395.070	138.720.576	(56.325.506)	(68.36)
Beban Tunj. Beras PNS	40.844.880	39.613.740	1.231.140	3.01
Beban Uang Makan PNS	102.400.000	89.708.000	12.692.000	12.39
Beban Tunjangan Umum PNS	0	2.405.000	(2.405.000)	0
Beban Uang Lembur	0	41.468.000	(41.468.000)	0
Total Belanja Brutto	1.796.785.091	2.209.070.788	(412.285.697)	(22.94)
Pengembalian Belanja	(115.411)	(115.258)	153	0.12
Total Belanja Netto	3.945.233.083	2.208.955.530	1.736.277.553	44.00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp. 315.416.600

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Gresik per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 315.416.600 dan Rp. 293.179.700.

Belanja Barang tahun 2017 mengalami kenaikan daripada tahun 2016 dikarenakan kenaikan harga barang

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	163.135.600	100.517.700	62.617.900	38.38
Belanja Barang Non Operasional	9.096.800	9.360.200	(263.400)	(2.89)
Belanja Jasa	26.323.200	30.058.250	(3.735.050)	(14.18)
Belanja Pemeliharaan	85.125.600	87.073.300	(1.947.700)	(2.28)
Belanja Perjalanan Dinas	24.468.900	45.039.100	(20.570.200)	(84.06)
Belanja Persediaan	7.266.500	21.131.150	(20.364.650)	(280.25)
Total Belanja Brutto	281.850.900	238.780.400	43.070.500	15.28
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	281.850.900	238.780.400	43.070.500	15.28

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal :Rp. 134.917.200

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Gresik per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 134.917.200 dan Rp. 97.999.660.

Realisasi Belanja Modal tahun 2017 mengalami kenaikan daripada tahun 2016 dikarenakan pada tehun 2017 belanja modalnya adalah pembelian laptop, antivirus,printer,cc tv Pengadilan Agama Gresik.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	134.917.200	97.999.660	36.917.540	27.36
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	134.917.200	97.999.660	36.917.540	27.36
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	134.917.200	97.999.660	36.917.540	27.36

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar: Rp. 48.147.754,-

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 48.147.754 dan Rp 52.343.900.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Gresik per 30 Juni 2017 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	41.500.000	50.500.000
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	3.020.004	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	(15.100)	0

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	3.004.904	0
Persediaan	3.642.850	1.843.900
Total Aset Lancar	48.147.754	52.343.900

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp. 41.500.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 41.500.000 dan Rp. 50.500.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2017	30 Juni 2016
1.	Kas di bendahara Pengeluaran	41.500.000	50.500.000
	Jumlah	41.500.000	50.500.000

C.1.2 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi: Rp. (3.020.004)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.004.904,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni TA 2017

No.	Uraian	30 Juni TA 2017	30 Juni TA 2016
1	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	3.020.004	0
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(15.100)	0
	Jumlah	3.004.904	0

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2017	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	0

C.1.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar TP/TGR : Rp. (15.100),-

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. (15.100) dan Rp. 0. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. , sedangkan per 30 Juni TA 2017 tercatat sebesar Rp. (15.100),-

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
(dalam satuan Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan
1	M. Khusnul Yakin		15.100.020	1,67	251.667
		Total			251.667

C.1.4. Persediaan

Persediaan: Rp. 3.642.850,-

Persediaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.642.850,- Persediaan dan Rp. 1.843.900,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan 30 Juni 2016

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Barang Konsumsi	2.593.200	2.923.850
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	1.049.650	2.606.500
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	3.642.850	5.530.350

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp. 4.504.280.059,-

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 4.504.280.059,- dan Rp. 4.448.470.696,- Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap *(dalam satuan Rupiah)*

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan
1	Tanah	2,230,000,000	2.230.000.000	0
2	Peralatan dan Mesin	1.486.205.966	1.356.288.266	129.917.700
3	Gedung dan Bangunan	2,228,578,000	2.228.578.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	5.255.970	5.255.970	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	8.646.500	8.646.500	0
7	Aset Tak Berwujud Lainnya	4.999.500	0	4.999.500
	Jumlah	5.963.685.936	4.828.768.736	134.917.200
	Akumulasi Penyusutan	(1.543.513.107)	(1.454.406.377)	(2.997.919.484)
	Nilai Buku Aset Tetap	4.420.172.829	4.374.362.359	(2.863.002.284)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.230.000.000 dan Rp. 2.230.000.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m^2)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	**1**	**1.900**	301:1899/Kb/1 981 7	Pemerintah RI c.q	Digunakan sendiri untuk Operasional	2.090.000.0002
2	**1**	**200**		Pemerintah RI c.q	Digunakan sendiri Untuk Operasional	140.000.000.
	Jumlah					**2.230.000.000**

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 1.486.205.966

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.486.205.966,- Peralatan dan Rp. 1.356.288.266,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2016	**1.356.288.266**
Mutasi Tambah	**129.917.700**
Mutasi Kurang	**0**
Saldo per 30 Juni 2017	1.486.205.966
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	**0**
Nilai Buku 30 Juni 2017	**1.486.205.966**

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp. 2,228,578,000,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 2,228,578,000,- Gedung dan Rp. 2.228.578.000,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2016	**2,228,578,000**
Mutasi Tambah	**0**
Mutasi Kurang	**0**
Saldo per 30 Juni 2017	2,228,578,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	**0**
Nilai Buku 30 Juni 2017	2,228,578,000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp. 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2016	**0**
Mutasi Tambah	**0**
Mutasi Kurang	**0**
Saldo per 30 Juni 2017	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	**0**
Nilai Buku 30 Juni 2017	**0**

	Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp. 5,255,970,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. (1.445.759.877),- dan Rp. (1.371.468.140)

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2016	5.255.970
Mutasi Tambah	**0**
Mutasi Kurang	**0**
Saldo per 30 Juni 2017	5,255,970
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	**0**
Nilai Buku 31 Desember 2016	5,255,970

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. [1,445,759,877]

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp(1.543.513.107),- dan Rp. (1.454.406.377).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.486.205.966	1.149.075.827	337.130.139
2	Gedung dan Bangunan	2.228.578.000	385.790.780	1.842.787.220
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	5.255.970	0	5.255.970
4	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	8.466.500	8.466.500	0
	Jumlah	5.963.685.936	1.543.513.107	2.185.173.329

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi : Rp (503.354)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp (503.354),- dan Rp5.536.654,- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)per tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No.	Debitur	Jumlah (Rp.)
1	M. Khusnul Yakin	251.667
Total		251.667

Mutasi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2016	4,026,652
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	4,026,652

C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR

Penyisihan Piutang tak Tertagih – TP/TGR : Rp. (27,683)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.544.977 dan Rp. (27.683). Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan
1	M. Khusnul Yakin		15.100.020	1,67	251.667
	Jumlah Total				251.667

C.4.1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain : Rp. 8,646,500,-

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 8,646,500,- dan Rp. 8,646,500,. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Gresik serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 Juni 2016	**8,646,500**
Mutasi Tambah	**0**
Mutasi Kurang	**0**
Saldo per 30 Juni 2017	**8,646,500**

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 43.447.600

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 43.447.600 dan Rp 50.500.000. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 30 Juni TA 2017 tercatat sebesar Rp. 43.447.600,-

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Gresik per 30 Juni 2017 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Aset Tak Berwujud	**1.947.600**	**0**
Uang Muka dari KPPN	41.500.000	50.500.000
Jumlah	**43.447.600**	50.500.000

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp. 41.500.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2017 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 41.500.000 dan Rp. 50.500.000 Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Cadangan Piutang: Rp. 4.521.021.336

Ekuitas per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.521.021.336,- dan Rp 4.455.823.567,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2017 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 65.197.769 (1.44%) dari nilai per 30 Juni TA 2017. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp4.521.021.336, sedangkan per 30 Juni TA 2016 tercatat sebesar Rp. 4.455.823.567,-

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp. 10.142.382

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 10.142.382 dan Rp 20.583.724. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
7.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	541.000	811.500	150.00
8.	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	1.510.000	1.510.002	100.00
9.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang	6.040.000	7.820.880	129.48

	Muka Gaji			
10.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
11.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	18.000.000	0	0,00
12.	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	11.698.000	0	0,00
	Total Pendapatan	37.789.000	10.142.382	26.83

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp. 1.796.695.091

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.1.796.695.091 dan Rp.2.155.983.115. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	737.448.400	858.358.985	(120.910.585)	(14.08)
Beban Pembulatan Gaji PNS	8.719	9.892	(1.173)	(11.85)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	54.441.600	58.737.620	(4.296.020)	(7.31)
Beban Tunj. Anak PNS	16.246.422	17.239.302	(992.880)	(5.75)
Beban Tunj. Struktural PNS	15.600.000	18.200.000	(2.600.000)	(14.28)
Beban Tunj. Fungsional PNS	747.400.000	935.395.000	(187.995.000)	(20.09)
Beban Tunj. PPh PNS	82.395.070	138.720.576	(56.325.506)	(40.60)
Beban Tunj. Beras PNS	40.844.880	39.613.740	1.231.140	3.10
Beban Uang Makan PNS	102.400.000	89.708.000	12.692.000	14.04
Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0	0
Beban Uang Lembur	0	0	0	0

Total Beban Pegawai	1.796.785.091	2.155.983.115	12.602.000	(96.84)

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp. 5.459.675

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 5.459.675,- dan Rp. 11.442.800,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	5.420.075	11.442.800	(6.022.725)	(52.63)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	39.600	0	39.600	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	5.459.675	11.442.800	39.600	(52.63)

D.4. Beban Jasa

Beban Jasa : Rp. 63,562,038

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 198.555.600 dan Rp. 139.936.150 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Listrik	25.112.000	27.090.400	(1.978.400)	(7.30)
Beban Jasa Telepon	562.500	1.885.350	(1.322.850)	(70.16)
Beban Jasa Air	648.700	1.082.500	(433.800)	(40.07
Beban Keperluan Perkantoran	126.419.400	87.447.500	38.971.900	44.56
Beban Penambah Daya Tahan	9.239.100	4.425.700	4.813.400	108.76

Tubuh				
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	407.100	244.500	162.600	66.50
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	16.950.000	8.400.000	8.550.000	101.78
Beban Barang Operasional Lainnya	10.120.000	0	10.120.000	0.00
Beban Bahan	5.096.800	7.572.700	(2.475.900)	(32.69)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	4.000.000	1.787.500	2.212.500	123.77
Total Beban Jasa	198.555.600	139.936.150	(433.800)	295.15

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp. 88.838.650

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 88.838.650 dan Rp95.659.325 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.482.300	39.346.000	(5.863.700)	(14.90
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.643.300	47.727.300	2.916.000	6.10
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.000.000	0	1.000.000	0.00
Beban Pemeliharaan lainnya	3.713.050	8.586.025	(4.872.975)	(56.75)
Total Beban Pemeliharaan	88.838.650	95.659.325	(4.872.975)	(65.64)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. *24.468.900*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 24.468.900 dan Rp 45.039.100 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016

adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	21.218.900	36.539.100	(15.320.200)	(41.92)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	3.250.000	8.500.000	(5.250.000)	(61.76)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	24.468.900	45.039.100	(5.250.000)	(103.69)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp.0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 uni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangungan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0

Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. (7.550.010)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp (7,550.010) dan Rp (7.550) Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	(7,550.010)	(7.550)	(7.542.460)	(99.13)

Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	(7,550.010)	(7.550)	(7.542.460)	(99.13)

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp. 0,-

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp.0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	14.155.000	(14,155,000)	(100.00)
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0

Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	14.155.000	(14.155.000)	(100.00)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 310 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 4.383.899.228 dan Rp 4.422.642.990

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp (2.099.764.401) dan Rp (2.559.571.326) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Dan Rp 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.5.Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 2.236.866.509 dan Rp 2.592.751.903 Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(10.142.382)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.247.028.891
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	2.236.866.509

E.6.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.521.021.336 dan Rp. 4.455.823.567

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada informasi pendapatan dan belanja secara akrual

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Gresik adalah :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Gresik A/C 0026-01-000538-30-0 a.n. BPG 135 Pengadilan Agama Gresik di gunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan Saldo akhir per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 0;

2.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Gresik A/C 0026-01-001346-30-8 a.n. BPG 135 Pengadilan Agama Gresik 04 digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 0;

F.2.4. Revisi DIPA

Tidak ada Revisi DIPA

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada ralat SPM, SSBP, dan SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada Catatan Penting lainnya

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Pengadilan Agama Gresik

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	464	1.500.505.966	1.163.375.827	337.130.139
1.	Alat Bantu	1	95,000	95,000	0
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	441,644,051	398.192.072	43.451.979
3.	Alat Kantor	70	109.926.300	81.153.930	28.772.370
4.	Alat Rumah Tangga	314	362.833.700	261.264.200	101.569.500
5.	Alat Studio	6	29.240.600	11.242.400	17.998.200
6.	Alat Komunikasi	8	1,072,000	1,072,000	0
7.	Unit Alat Laboratorium	8	0	0	0
8.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	0	0	0
9.	Alat Khusus Kepolisian	4	0	0	0
10.	Komputer Unit	46	450.333.770	351.235.280	99.098.490
11.	Peralatan Komputer	24	106.360.545	59.120.945	47.239.600
B.	Gedung dan Bangunan	3	2,228,578.000	385.790.780	1.842.787.220
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2	2,191,478,000	373.931.842	1.817.546.158
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	37,100,000	11.858.938	25.241.062
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	-
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	38	10,696,500	10,696,50	0
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0
2.	Alat Kantor	7	683.000	683.000	0
3.	Alat Rumah Tangga	25	6.183.500	6.183.500	0
4.	Alat Komunikasi	0	0	0	0
5.	Unit Alat Laboratorium	0	0	0	0
6.	Komputer Unit	0	0	0	0
7.	Peralatan Komputer	4	3.250.000	3.250.000	0
8.	Peralatan Olahraga	2	580.000	580.000	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		3.739.780.466	1,470,756,377	2.269.024.089
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya				